

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Indikator kesejahteraan sebagai tujuan akhir dari pembangunan suatu masyarakat yang hanya menggunakan pendapat perkapita tidak akurat. Pendapatan perkapita tidak fokus terhadap pembangunan manusia melainkan pembangunan ekonomi secara menyeluruh (Bhakti, 2012). Dalam pembangunan manusia juga diperhatikan pembangunan ekonomi di dalamnya untuk mengukur kesejahteraan manusia. Perkembangan Manusia di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun. Perkembangan tersebut merupakan hal positif bagi negara Indonesia dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu cara untuk mengukur kualitas hidup manusia pada suatu negara secara fisik dan non fisik. Pada kualitas fisik dijelaskan dari angka harapan hidup, sedangkan kualitas non fisik melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf serta kemampuan ekonomi setiap penduduk (Handayani dan Woyanti, 2021).

Kemiskinan merupakan suatu hal yang kompleks dimana keadaan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang saling berkaitan. Beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan ialah tingkat pendapatan masyarakat, kondisi kesehatan, tersedianya akses terhadap barang maupun jasa, letak geografis, gender, kualitas pendidikan, serta lokasi lingkungan (Sadikin & Rusmasari, 2022).

Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan (Bappeda. 2011) oleh karena itu tingkat kemiskinan dapat mempengaruhi nilai Indeks Pembangunan Manusia (Chalid dan Yusuf, 2024). Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemajuan sumberdaya modal serta pengelolaan sumber daya alam yang tepat dapat mendorong peningkatan pendapatan per kapita. Indeks pembangunan manusia merupakan bentuk nyata pembangunan ekonomi yang memberikan dampak pada kondisi sosial ekonomi, kondisi tenaga kerja dan pengangguran serta kemiskinan yang melanda masyarakat (Yustie, 2017). Hubungan antara tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia, seperti pada banyak negara lainnya, dapat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Meskipun kedua indikator tersebut dapat saling terkait, perlu diperhatikan bahwa hubungan kausalitas mungkin tidak selalu bersifat langsung. seperti tingkat kemiskinan sering kali berkaitan erat dengan pendapatan rumah tangga. Jika pendapatan rumah tangga rendah, ini dapat mencerminkan tingkat kemiskinan yang tinggi dan pada gilirannya dapat mempengaruhi komponen penghasilan IPM dan tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi yang lebih besar dalam masyarakat. IPM mencakup indikator ketidaksetaraan, dan ketidaksetaraan yang tinggi dapat mempengaruhi nilai IPM negatif.

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa

tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (Bappeda, 2011). Tingkat pengangguran ini dapat mempengaruhi nilai IPM (Chalid dan Yusuf, 2014). Tingkat pengangguran terbuka dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduk. Jika penduduk memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, mereka mungkin lebih mudah mendapatkan pekerjaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan IPM dan IPM juga mencakup indikator kesehatan seperti harapan hidup dan akses ke layanan kesehatan. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat berdampak negatif pada kesejahteraan kesehatan masyarakat, yang dapat mempengaruhi IPM

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tiga kawasan Indonesia bagian Timur yaitu Papua, Papua Barat dan Maluku Utara tersebut memiliki IPM lebih rendah jika dibandingkan dengan kawasan di Indonesia bagian Barat lainnya. Pada wilayah Indonesia bagian timur tidak ada provinsi yang memiliki IPM kategori rendah atau di bawah angka 60. Mayoritas provinsi masuk dalam kategori sedang, terutama pada wilayah yang berada di kawasan Indonesia timur. Sepuluh provinsi yang memiliki IPM terendah secara berturut-turut adalah Papua, Papua Barat, NTT, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, NTB, Maluku Utara, Gorontalo, Maluku, dan Sulawesi Tengah.

Tabel 1.1
Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Penduduk Miskin, dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua 2010-2021

Tahun	Provinsi	TPT	Persentase Jumlah Penduduk Miskin	Indeks Pembangunan Manusia
2010	Papua	3,55	34,1	54,45
2011	Papua	3,94	34,11	55,01
2012	Papua	3,63	30,66	55,55
2013	Papua	3,15	31,52	56,25

2014	Papua	3,44	27,8	56,75
2015	Papua	3,99	28,17	57,25
2016	Papua	3,35	28,54	58,05
2017	Papua	3,62	27,62	59,09
2018	Papua	3,2	27,74	60,06
2019	Papua	3,65	27,53	60,84
2020	Papua	4,28	26,64	60,44
2021	Papua	3,33	26,86	60,62

Sumber : (Badan Pusat Statistik Papua, 2023),

Tabel 1.2

Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Penduduk Miskin, dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat 2010-2021

Tahun	Provinsi	TPT	Persentase Jumlah Penduduk Miskin	Indeks Pembangunan Manusia
2010	Papua Barat	7,68	28,59	59,6
2011	Papua Barat	8,94	28,53	59,9
2012	Papua Barat	5,49	27,04	60,3
2013	Papua Barat	4,62	27,14	60,91
2014	Papua Barat	5,02	26,26	61,28
2015	Papua Barat	8,08	25,82	61,73
2016	Papua Barat	7,46	25,43	62,21
2017	Papua Barat	6,49	25,1	62,99
2018	Papua Barat	6,45	23,01	63,74
2019	Papua Barat	6,43	22,17	64,7
2020	Papua Barat	6,8	21,37	65,09
2021	Papua Barat	5,84	21,84	65,26

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2023)

Tabel 1.3

Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Penduduk Miskin, dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara

Tahun	Provinsi	TPT	Persentase Jumlah Penduduk Miskin	Indeks Pembangunan Manusia
2010	Maluku Utara	6,03	9,42	62,79
2011	Maluku Utara	5,23	9,18	63,19
2012	Maluku Utara	4,78	8,47	63,93
2013	Maluku Utara	3,8	7,5	64,78
2014	Maluku Utara	5,29	7,3	65,18
2015	Maluku Utara	6,05	6,84	65,91
2016	Maluku Utara	5,33	6,33	66,63

2017	Maluku Utara	4,77	6,35	67,2
2018	Maluku Utara	4,97	6,64	67,76
2019	Maluku Utara	5,15	6,77	68,7
2020	Maluku Utara	4,71	6,78	68,49
2021	Maluku Utara	3,98	6,89	68,76

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2023)

Berdasarkan Tabel 1.1, 1.2 dan 1.3 di atas, data BPS menunjukkan bahwa pada Provinsi Papua Tahun 2010-2021 tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan mengalami fluktuasi. Indeks pembangunan manusia pada provinsi papua tahun 2010-2019 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan dari 60,84 menjadi 60,44 pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan kembali sebesar 60,62 pada tahun 2021. Pada Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2021 tingkat pengangguran terbuka mengalami fluktuasi. Kemiskinan pada Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2012 mengalami penurunan pada setiap tahunnya namun, pada tahun 2013 mengalami peningkatan dari 27,04 menjadi 27,14 pada tahun 2013 dan pada tahun 2014-2020 mengalami penurunan pada setiap tahunnya dan mengalami peningkatan kembali sebesar 21,84 pada tahun 2021. Indeks pembangunan manusia pada Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2021 tingkat pengangguran terbuka mengalami fluktuasi. Kemiskinan pada Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2016 mengalami penurunan setiap tahunnya namun pada tahun 2017-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Indeks pembangunan manusia pada Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pengaruh Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di tiga Kawasan Indonesia Timur periode 2010-2021.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di tiga Kawasan Indonesia Timur Periode 2010-2021?
2. Bagaimanakah pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di tiga Kawasan Indonesia Timur Periode 2010-2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di tiga Kawasan Indonesia Timur periode 2010-2021.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di tiga Kawasan Indonesia Timur 2010-2021.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Pemerintah, sebagai salah satu bahan referensi untuk melihat pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Tiga Kawasan Indonesia Timur.
2. Peneliti atau pembaca sebagai bahan referensi dan pembandingan studi atau penelitian yang terkait riset ini.

1.5. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di tiga Kawasan Indonesia Timur periode 2010-2021.
2. Diduga Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di tiga kawasan Indonesia Timur periode 2010-2021.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam bagian ini disajikan rencana sistematika penulisan dari skripsi, sebagai contoh:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum tentang teori-teori yang digunakan sebagai literatur dan landasan berpikir, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang obyek penelitian, jenis data dan sumber data, definisi operasional variabel, metode dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi daerah penelitian, analisis data, hasil analisis data dan pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan atau kendala dalam penelitian, serta saran-saran yang disampaikan baik untuk obyek penelitian ataupun selanjutnya